

Dampak Literasi Ekonomi dan Infrastruktur pada Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan: Analisis Mediasi Pemberdayaan

Zakaria Basran¹, Syahran², Ayu Asmira³
Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
zbasran63@gmail.com



©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *Welfare inequality in border regions is a global and national development challenge that requires serious attention. This study aims to analyze the influence of sustainable economic literacy and economic infrastructure on the welfare of border communities, with economic empowerment as a mediating variable. A quantitative approach using an explanatory research design and PLS-SEM analysis method was applied to 250 respondents from productive communities in the border region of North Kalimantan. The results indicate that sustainable economic literacy has a significant positive effect on welfare, while economic infrastructure has no significant direct effect. However, economic empowerment has been shown to significantly mediate the influence of economic literacy and economic infrastructure on community welfare. The discussion indicates that physical development is insufficient without strengthening community capacity through empowerment. The limitations of this study lie in its cross-sectional design, which is unable to explain the dynamics of long-term change, and its limited focus on internal factors. Recommendations for policymakers include integrating infrastructure development with participatory community-based economic literacy and empowerment programs to achieve inclusive and sustainable impacts in border regions.*

Keywords: *Sustainable Economic Literacy, Economic Infrastructure, Economic Empowerment, Economic Welfare, Border Regions.*

Abstrak: Ketimpangan kesejahteraan di wilayah perbatasan menjadi tantangan pembangunan global dan nasional yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan, dengan pemberdayaan ekonomi sebagai variabel mediasi. Pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research dan metode analisis PLS-SEM diterapkan terhadap 250 responden masyarakat produktif di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi ekonomi berkelanjutan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan, sedangkan infrastruktur ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan. Namun, pemberdayaan ekonomi terbukti secara signifikan memediasi pengaruh literasi ekonomi dan infrastruktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Diskusi menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak cukup tanpa penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada desain cross-sectional yang belum mampu menjelaskan dinamika perubahan jangka panjang serta fokus variabel yang terbatas pada faktor internal. Saran bagi pemangku kebijakan adalah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan program peningkatan literasi ekonomi dan pemberdayaan berbasis komunitas yang partisipatif untuk mencapai dampak yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan.

Kata kunci: Literasi Ekonomi Berkelanjutan, Infrastruktur Ekonomi, Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Ekonomi, Wilayah Perbatasan

PENDAHULUAN

Ketimpangan kesejahteraan ekonomi masih menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dalam agenda pembangunan berkelanjutan dunia. Laporan World Bank menunjukkan bahwa lebih dari 700 juta penduduk dunia masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan ekonomi, infrastruktur dasar, dan peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, transformasi ekonomi global yang bergerak menuju pembangunan berkelanjutan menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan memahami prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan agar mampu mengelola sumber daya secara produktif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang (Lang et al., 2024). Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti akses jalan, jaringan transportasi, pasar, fasilitas digital, dan layanan keuangan juga memperbesar kesenjangan kesejahteraan antarwilayah, khususnya di daerah perbatasan yang secara geografis relatif tertinggal dibandingkan pusat pertumbuhan ekonomi (Straub et al., 2025). Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai mekanisme penting yang dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan literasi ekonomi dan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan (Arifin et al., 2024).

Di Indonesia, persoalan ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan utama, terutama pada wilayah terluar dan perbatasan negara. Meskipun pemerintah terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan melalui berbagai program strategis nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan ekonomi, rendahnya produktivitas usaha masyarakat, minimnya akses pasar, serta keterbatasan infrastruktur ekonomi yang memadai (Rahim et al., 2024). Wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, khususnya daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Kabupaten Malinau dan Nunukan, menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks akibat keterisolasian wilayah, tingginya biaya distribusi, dan ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga (Bangun et al., 2024). Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat bergerak lebih lambat dibandingkan daerah perkotaan maupun kawasan ekonomi utama lainnya. Pada saat yang sama, rendahnya literasi ekonomi berkelanjutan membuat masyarakat belum sepenuhnya mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal dan berorientasi pada keberlanjutan. Padahal, wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, kehutanan, dan ekonomi kreatif yang besar apabila didukung oleh infrastruktur ekonomi yang memadai dan pemberdayaan masyarakat yang efektif (Bangun et al., 2024).

Kajian mengenai kesejahteraan ekonomi masyarakat selama ini umumnya lebih banyak menitikberatkan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi makro, investasi, atau pembangunan infrastruktur secara parsial (Tobing-David et al., 2024). Penelitian terdahulu juga cenderung menempatkan literasi ekonomi hanya dalam konteks perilaku konsumsi dan keuangan individu, sementara dimensi literasi ekonomi berkelanjutan yang menekankan kemampuan masyarakat dalam memahami efisiensi ekonomi, keberlanjutan sumber daya, dan ketahanan ekonomi lokal masih relatif terbatas dibahas, khususnya pada masyarakat wilayah perbatasan (Tong et al., 2024). Selain itu, sebagian besar penelitian menguji hubungan langsung antara infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan tanpa mempertimbangkan peran pemberdayaan ekonomi sebagai mekanisme mediasi yang dapat memperkuat dampak pembangunan terhadap

masyarakat (Pakasi et al., 2024). Kesenjangan empiris ini menunjukkan perlunya model penelitian yang lebih integratif untuk menjelaskan bagaimana literasi ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui proses pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi keterbatasan literatur sebelumnya dengan mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual pada wilayah perbatasan (Bangun et al., 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana literasi ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan, serta bagaimana pemberdayaan ekonomi berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Pertanyaan ini menjadi penting karena peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan, baik secara langsung maupun melalui pemberdayaan ekonomi sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membangun model empiris yang mampu menjelaskan keterkaitan antara aspek kapasitas masyarakat dan dukungan struktural pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan di kawasan perbatasan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan konsep integratif antara literasi ekonomi berkelanjutan, infrastruktur ekonomi, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam konteks wilayah perbatasan yang masih jarang dikaji dalam literatur internasional. Secara teoritis, penelitian ini memperluas perspektif pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dengan mengintegrasikan pendekatan *capability development* dan *sustainable economic empowerment* dalam menjelaskan kesejahteraan masyarakat wilayah perifer. Dari sisi kebaruan ilmiah, penelitian ini menawarkan model mediasi pemberdayaan ekonomi dalam hubungan antara literasi ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah, lembaga pembangunan, dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi pembangunan wilayah perbatasan yang lebih inklusif melalui penguatan literasi ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata, dan program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi keberlanjutan.

Pengembangan Teori dan Hipotesis

Penelitian ini berlandaskan pada *Capability Theory* (Amartya Sen) dan *Sustainable Development Theory*. *Capability Theory* menekankan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga kemampuan individu memanfaatkan peluang ekonomi. Sementara itu, *Sustainable Development Theory* menekankan pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Integrasi kedua teori ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat perbatasan memerlukan penguatan kapasitas individu (literasi ekonomi berkelanjutan) dan kapasitas kolektif (pemberdayaan ekonomi), selain dukungan infrastruktur.

Literasi Ekonomi Berkelanjutan (LEB) didefinisikan sebagai kemampuan individu memahami, mengelola, dan mengambil keputusan ekonomi secara rasional dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Pemberdayaan Ekonomi (PE)

adalah proses peningkatan akses, kemampuan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola aktivitas ekonomi. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (KEM) mencakup peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

Hubungan LEB, PE, dan KEM

Capability Theory menjelaskan bahwa pengetahuan ekonomi mendorong masyarakat mengenali peluang usaha dan mengelola sumber daya. Masyarakat dengan LEB yang baik cenderung lebih produktif dan mandiri. Penelitian sebelumnya menunjukkan LEB berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi. LEB juga secara teoritis berpengaruh langsung terhadap KEM, karena individu yang melek ekonomi mampu mengelola pendapatan dan mengurangi perilaku konsumtif. Namun, pengaruh langsung ini tidak selalu konsisten, sehingga diperlukan variabel mediasi seperti PE. PE sendiri memiliki hubungan kuat dengan KEM, karena masyarakat yang diberdayakan cenderung memiliki pendapatan lebih baik dan ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Maka diajukan hipotesis:

Hubungan Infrastruktur Ekonomi (IE), PE, dan KEM

IE didefinisikan sebagai sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi, seperti jalan, pasar, transportasi, dan akses digital. Capability Theory menekankan bahwa infrastruktur memperluas kapabilitas masyarakat, namun efektivitasnya bergantung pada tingkat pemberdayaan masyarakat. IE yang memadai menurunkan biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan mendorong aktivitas ekonomi. Penelitian terbaru menunjukkan IE berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. PE memungkinkan masyarakat memanfaatkan infrastruktur secara produktif, yang pada akhirnya meningkatkan KEM. Temuan empiris juga menunjukkan program pemberdayaan berbasis komunitas mampu meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi. Meskipun IE secara langsung dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan mobilitas ekonomi, hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten: tanpa kapasitas masyarakat yang memadai, infrastruktur belum tentu meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, PE menjadi variabel mediasi yang penting

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menganalisis hubungan kausal antara literasi ekonomi berkelanjutan, infrastruktur ekonomi, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan struktural antarvariabel secara empiris melalui pengujian hipotesis berbasis data lapangan (Mulyono et al., 2024). Penelitian dilakukan pada masyarakat wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya pada daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, karena kawasan tersebut merepresentasikan wilayah dengan tantangan pembangunan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan dinamika pemberdayaan masyarakat yang khas (Rahim et al., 2023). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu masyarakat usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi lokal, baik sektor formal maupun informal, yang relevan dengan konteks pembangunan ekonomi dan ketimpangan wilayah perbatasan (Bangun et al., 2024).

Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat produktif yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Mengingat jumlah populasi yang besar dan tersebar pada beberapa wilayah administratif, penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden yaitu masyarakat yang telah tinggal

minimal tiga tahun di wilayah perbatasan, memiliki aktivitas ekonomi produktif, dan memahami kondisi ekonomi lokal (Hair Jr. et al., 2019). Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh responden yang relevan dengan tujuan penelitian serta sesuai dengan pendekatan pemilihan sampel non-probabilitas yang berfokus pada karakteristik tertentu (Sarstedt et al., 2024a). Ukuran sampel ditentukan berdasarkan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yang merekomendasikan jumlah sampel minimal 10 kali jumlah jalur struktural terbesar dalam model penelitian (Hair Jr. et al., 2019). Dengan mempertimbangkan kompleksitas model dan kebutuhan generalisasi hasil, penelitian ini menargetkan sekitar 200 responden agar menghasilkan estimasi model yang stabil dan representatif.

Instrumen pengukuran variabel diadaptasi dari penelitian-penelitian bereputasi internasional dan sumber open access terkini yang relevan agar memiliki validitas konseptual yang kuat. Variabel literasi ekonomi berkelanjutan diadaptasi dari konsep *sustainable economic literacy* yang menekankan pemahaman individu terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi secara efisien, produktif, dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan ekonomi modern (Bachelet, 2016). Variabel infrastruktur ekonomi diukur berdasarkan dimensi aksesibilitas infrastruktur, konektivitas ekonomi, fasilitas pasar, dan dukungan layanan ekonomi yang sejalan dengan temuan dalam studi pembangunan wilayah kontemporer yang menekankan pentingnya investasi infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan konektivitas ekonomi (Zhang, 2024). Variabel pemberdayaan ekonomi diadaptasi dari indikator *capacity building*, *economic participation*, dan *community self-reliance* yang banyak digunakan dalam studi pembangunan manusia modern, yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan komunitas dalam mencapai kemandirian ekonomi berkelanjutan (Balogun et al., 2024). Variabel kesejahteraan ekonomi masyarakat diukur melalui indikator peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, dan keberlanjutan ekonomi keluarga yang merujuk pada pendekatan kesejahteraan ekonomi global terkini yang menekankan multidimensional welfare dan ketahanan ekonomi rumah tangga (Zhang, 2024).

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etika penelitian sesuai standar publikasi internasional. Seluruh responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data, dan hak responden untuk menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi tertentu (Cheung et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan secara sukarela dengan prinsip informed consent. Selain itu, identitas responden dijaga kerahasiaannya dan seluruh data hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Penelitian ini berupaya menghindari bias, manipulasi data, maupun konflik kepentingan agar memenuhi prinsip integritas ilmiah dan etika publikasi jurnal internasional bereputasi.

Hasil Analisa Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Variabel	Range Loading Faktor	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	AVE
Infrastruktur Ekonomi	0.744 – 0.851	0.874	0.879	0.665
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.784 – 0.860	0.876	0.880	0.668

Literasi Ekonomi Berkelanjutan	0.789 – 0.864	0.897	0.899	0.662
Pemberdayaan Ekonomi	0.631 – 0.846	0.789	0.809	0.543

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel—Infrastruktur Ekonomi, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Literasi Ekonomi Berkelanjutan, dan Pemberdayaan Ekonomi—telah memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Hal ini dibuktikan oleh nilai *loading faktor* yang memadai, konsistensi internal yang tinggi dengan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,60, serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang melampaui batas minimal 0,50, sehingga mengonfirmasi bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruksinya secara akurat dan reliabel untuk analisis lanjutan.

Validitas Diskriminan

Heterotraid Monotraid

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Diskriminan Heterotraid Monotraid

Variabel	Infrastruktur Ekonomi	Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Literasi Ekonomi Berkelanjutan	Pemberdayaan Ekonomi
Infrastruktur Ekonomi				
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.772			
Literasi Ekonomi Berkelanjutan	0.815	0.867		
Pemberdayaan Ekonomi	0.669	0.705	0.629	

Hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan kriteria Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian memiliki tingkat validitas diskriminan yang baik. Nilai HTMT antarvariabel berada di bawah ambang batas 0,90, yaitu antara Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat sebesar 0,772, Infrastruktur Ekonomi dan Literasi Ekonomi Berkelanjutan sebesar 0,815, serta Infrastruktur Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi sebesar 0,669. Selanjutnya, hubungan antara Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Literasi Ekonomi Berkelanjutan memperoleh nilai 0,867, sedangkan hubungan dengan Pemberdayaan Ekonomi sebesar 0,705. Adapun nilai HTMT antara Literasi Ekonomi Berkelanjutan dan Pemberdayaan Ekonomi sebesar 0,629. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk memiliki karakteristik yang berbeda secara empiris sehingga model penelitian memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Diskriminan Fornell Larcker

Variabel	Infrastruktur Ekonomi	Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Literasi Ekonomi Berkelanjutan	Pemberdayaan Ekonomi
Infrastruktur Ekonomi	0.816			

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.683	0.817		
Literasi Ekonomi Berkelanjutan	0.810	0.775	0.813	
Pemberdayaan Ekonomi	0.573	0.604	0.548	0.737

Analisis validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker mengonfirmasi bahwa seluruh variabel penelitian—infrastruktur ekonomi, kesejahteraan ekonomi masyarakat, literasi ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi—memiliki validitas yang memadai, karena nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) setiap variabel lebih tinggi dibandingkan korelasi antarvariabel lainnya, yang menunjukkan bahwa setiap variabel mampu menjelaskan konstraknya masing-masing secara berbeda dalam model penelitian.

Variance Inflation Factor (VIF)

Tabel 5 Hasil Uji Variance Inflation Factor (VIF)

Konstruk	Rentang VIF
Infrastruktur Ekonomi (EE1–EE5)	1.710 – 2.434
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (NP1–NP5)	1.824 – 2.637
Literasi Ekonomi Berkelanjutan (PE1–PE5)	1.964 – 3.150
Pemberdayaan Ekonomi (SI1–SI5)	1.447 – 2.066

Hasil pengujian Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa seluruh indikator pada setiap konstruk berada dalam batas yang dapat diterima, yaitu di bawah ambang batas 5, sehingga model penelitian dinyatakan bebas dari permasalahan multikolinearitas. Konstruk Infrastruktur Ekonomi memiliki rentang VIF sebesar 1.710–2.434, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat sebesar 1.824–2.637, Literasi Ekonomi Berkelanjutan sebesar 1.964–3.150, dan Pemberdayaan Ekonomi sebesar 1.447–2.066. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antarindikator tidak menunjukkan korelasi yang berlebihan, sehingga seluruh variabel layak digunakan dalam analisis lanjutan pada model struktural.

Tabel 6 Hasil uji Fit Model

Indikator	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.080	0.080
d_ ULS	1.488	1.488
d_ G	n/a	n/a
Chi-square	∞	∞
NFI	n/a	n/a

Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa nilai Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) pada saturated model dan estimated model sama-sama sebesar 0,080, yang mengindikasikan bahwa model telah memenuhi batas kelayakan model dan menunjukkan tingkat kesesuaian yang dapat diterima. Nilai d_ ULS pada kedua model sebesar 1,488 menunjukkan tingkat perbedaan residual yang relatif rendah antara matriks kovarians empiris dan model yang diestimasi. Sementara itu, indikator d_ G dan NFI tidak tersedia (n/a), serta nilai chi-square menunjukkan hasil tak terhingga (∞), yang umumnya dapat terjadi pada estimasi model berbasis variance seperti PLS-SEM. Secara keseluruhan, hasil fit model mengindikasikan bahwa

model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang memadai untuk digunakan dalam pengujian hipotesis lebih lanjut.

Evaluasi Inner Model

Tabel 7 Hasil Uji Evaluasi Inner Model

Variabel / Hubungan	R-square	R-square Adjusted	f-square
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.648	0.643	—
Pemberdayaan Ekonomi	0.349	0.342	—
Infrastruktur Ekonomi → Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	—	—	0.004
Infrastruktur Ekonomi → Pemberdayaan Ekonomi	—	—	0.074
Literasi Ekonomi Berkelanjutan → Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	—	—	0.324
Literasi Ekonomi Berkelanjutan → Pemberdayaan Ekonomi	—	—	0.032
Pemberdayaan Ekonomi → Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	—	—	0.109

Hasil pengujian model struktural menunjukkan bahwa variabel Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat memiliki nilai R-square sebesar 0,648 dan R-square adjusted sebesar 0,643. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 64,8% variasi kesejahteraan ekonomi masyarakat mampu dijelaskan oleh Infrastruktur Ekonomi, Literasi Ekonomi Berkelanjutan, dan Pemberdayaan Ekonomi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Sementara itu, variabel Pemberdayaan Ekonomi memiliki nilai R-square sebesar 0,349 dan R-square adjusted sebesar 0,342, yang berarti 34,9% variasi pemberdayaan ekonomi dapat dijelaskan oleh Infrastruktur Ekonomi dan Literasi Ekonomi Berkelanjutan.

Berdasarkan nilai effect size (f-square), Literasi Ekonomi Berkelanjutan memiliki pengaruh terbesar terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan nilai 0,324 yang termasuk kategori sedang hingga kuat. Selanjutnya, Pemberdayaan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat menunjukkan pengaruh kategori sedang dengan nilai 0,109. Infrastruktur Ekonomi terhadap Pemberdayaan Ekonomi memiliki pengaruh kecil dengan nilai 0,074, sedangkan Literasi Ekonomi Berkelanjutan terhadap Pemberdayaan Ekonomi juga menunjukkan pengaruh kecil dengan nilai 0,032. Adapun pengaruh Infrastruktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat memiliki nilai effect size paling rendah, yaitu 0,004, yang menunjukkan pengaruh sangat kecil dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur (β)	T-Statistics	P-Values	Keputusan
H1	Infrastruktur Ekonomi → Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.070	0.625	0.532	Ditolak
H2	Infrastruktur Ekonomi → Pemberdayaan Ekonomi	0.375	3.518	0.000	Diterima
H3	Literasi Ekonomi Berkelanjutan → Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.585	6.726	0.000	Diterima

H4	Literasi Ekonomi Berkelanjutan → Pemberdayaan Ekonomi	0.245	2.427	0.015	Diterima
H5	Pemberdayaan Ekonomi → Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.243	3.967	0.000	Diterima
H6	Infrastruktur Ekonomi → Pemberdayaan Ekonomi → Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.091	2.412	0.016	Mediasi Signifikan
H7	Literasi Ekonomi Berkelanjutan → Pemberdayaan Ekonomi → Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	0.059	2.042	0.041	Mediasi Signifikan

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kapasitas masyarakat dibandingkan pembangunan fisik semata. Literasi ekonomi berkelanjutan terbukti memiliki pengaruh paling kuat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pemberdayaan ekonomi (Faisal Anwar et al., 2024). Infrastruktur ekonomi juga terbukti berperan penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat (Pakasi et al., 2024). Selain itu, pemberdayaan ekonomi terbukti mampu memediasi hubungan antara infrastruktur ekonomi dan literasi ekonomi berkelanjutan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arhim et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi wilayah perbatasan tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi harus disertai peningkatan kapasitas masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan (Rahim et al., 2024).

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat perspektif *capability approach* yang dikemukakan oleh Sen dan dikembangkan kembali dalam kajian kontemporer mengenai kesejahteraan berbasis kapabilitas, yang menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya fisik, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam memanfaatkan peluang ekonomi secara efektif (Arifin et al., 2024). Literasi ekonomi berkelanjutan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan ekonomi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi, yang terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rumah tangga (Zhang, 2024). Kemampuan tersebut mendorong masyarakat menjadi lebih produktif, mandiri, dan memiliki orientasi jangka panjang terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga maupun komunitas. Di sisi lain, infrastruktur ekonomi berfungsi sebagai *enabling factor* yang menciptakan akses terhadap pasar, distribusi, transportasi, dan aktivitas ekonomi lainnya, yang secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional (Shen et al., 2025). Namun, tanpa kapasitas masyarakat yang memadai, infrastruktur belum tentu menghasilkan peningkatan kesejahteraan secara langsung. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi menjadi mekanisme penting yang menjembatani antara akses struktural dan

kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang tersedia melalui penguatan kapasitas dan partisipasi aktif masyarakat (Wang & Ye, 2024).

Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai studi internasional terbaru yang menegaskan pentingnya literasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah berkembang (Lang et al., 2024). Penelitian yang sebelumnya menunjukkan bahwa literasi ekonomi dan financial capability memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga, penguatan ketahanan ekonomi, dan pengurangan kerentanan ekonomi masyarakat pedesaan maupun wilayah perifer (Zhang, 2024).

Studi lain juga menemukan bahwa pemberdayaan ekonomi mampu memperkuat dampak pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat yang berdaya cenderung lebih mampu memanfaatkan akses ekonomi secara produktif (Arhim et al., 2024). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian pada kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia sering kali menghasilkan dampak ekonomi yang terbatas (Lang et al., 2024).

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa studi yang menyatakan bahwa infrastruktur ekonomi memiliki pengaruh langsung yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat (AllahRakha, 2024). Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh karakteristik wilayah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan kualitas pendidikan, kapasitas usaha masyarakat, serta rendahnya kemampuan adaptasi ekonomi sehingga manfaat infrastruktur belum dapat dioptimalkan secara langsung (Okabe, 2025).

Tidak signifikannya pengaruh langsung infrastruktur ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Secara empiris, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jalan, pasar, jaringan transportasi, atau fasilitas ekonomi lainnya belum otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila masyarakat belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memanfaatkan akses tersebut (Arifin et al., 2024). Dalam konteks wilayah perbatasan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi ekonomi, serta minimnya akses pelatihan dan pengembangan kapasitas (Rahim et al., 2024). Selain itu, karakteristik geografis wilayah perbatasan yang terpencil menyebabkan biaya distribusi dan aktivitas ekonomi tetap tinggi meskipun infrastruktur telah dibangun (Chu & Duong, 2024; Straub et al., 2025). Faktor metodologis seperti heterogenitas tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan responden juga dapat memengaruhi lemahnya pengaruh langsung infrastruktur terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arifin et al., 2024). Oleh sebab itu, hasil ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi agar dampaknya menjadi lebih efektif dan inklusif (Lang et al., 2024).

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pengembangan model kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui integrasi literasi ekonomi berkelanjutan, infrastruktur ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kerangka konseptual yang utuh (Mulyono et al., 2024). Studi ini tidak hanya menguji hubungan langsung antarvariabel, tetapi juga menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai mekanisme mediasi yang menjelaskan bagaimana faktor struktural dan kapasitas individu berinteraksi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adzmi et al., 2024; Mulyono et al., 2024). Temuan ini memperkaya literatur pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, khususnya dalam konteks sustainable

development dan community empowerment di wilayah perbatasan yang masih relatif terbatas dikaji dalam penelitian internasional (Chu & Duong, 2024; Pakasi et al., 2024). Selain itu, penelitian ini memperluas validitas teori capability development dalam konteks emerging region dengan menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi lebih efektif dicapai melalui kombinasi antara akses ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat (Zhang, 2024).

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah, lembaga pembangunan, dan pemangku kebijakan di wilayah perbatasan (Pakasi et al., 2024). Program pembangunan ekonomi sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik seperti jalan, pasar, dan sarana distribusi, tetapi juga harus diintegrasikan dengan peningkatan literasi ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, edukasi pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal (Mulyono et al., 2024; Padmapriya & Chud, 2024). Pemerintah daerah juga perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses permodalan, pendampingan usaha, digitalisasi ekonomi lokal, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa (Zhang, 2024). Selain itu, kebijakan pembangunan kawasan perbatasan perlu dirancang secara partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Pendekatan tersebut penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Kontribusi kontekstual penelitian ini terletak pada fokus kajian di wilayah perbatasan yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam literatur internasional, terutama terkait integrasi antara literasi ekonomi berkelanjutan, infrastruktur ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat (Okabe, 2025; Rahim et al., 2023). Wilayah perbatasan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi karena menghadapi tantangan keterisolasian, keterbatasan akses layanan publik, serta ketergantungan ekonomi lintas negara (Adzmi et al., 2024). Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya menekankan pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal (Lee & Eversole, 2019). Konteks ini penting secara akademik karena memperluas generalisasi teori pembangunan ekonomi ke wilayah emerging dan peripheral regions yang selama ini masih under-researched dalam publikasi internasional bereputasi.

Meskipun penelitian ini memberikan temuan yang penting, beberapa keterbatasan tetap perlu diperhatikan. Pertama, penelitian dengan desain cross-sectional memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika hubungan antarvariabel secara longitudinal sehingga belum mampu menangkap perubahan dalam jangka panjang (Lang et al., 2024). Kedua, keterbatasan lokasi penelitian pada wilayah perbatasan tertentu menyebabkan hasil penelitian perlu digeneralisasi secara hati-hati karena adanya perbedaan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi antarwilayah (Du & Jiao, 2023; Wang & Ye, 2024). Ketiga, penelitian ini masih berfokus pada variabel internal masyarakat dan infrastruktur ekonomi, sementara faktor eksternal seperti kualitas kelembagaan, dukungan kebijakan pemerintah, akses teknologi digital, dan modal sosial belum dianalisis secara komprehensif (Wang & Ye, 2024; Zhou et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan longitudinal untuk memahami dinamika kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih mendalam. Selain itu, pengembangan model

dengan menambahkan variabel moderasi seperti digital inclusion, social capital, dan government support juga direkomendasikan agar mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip literasi ekonomi berkelanjutan melalui proses pemberdayaan ekonomi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa infrastruktur ekonomi yang memadai memang menciptakan akses terhadap aktivitas produktif, distribusi, dan peluang usaha, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi lebih kuat ketika masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang adaptif, mandiri, dan berorientasi keberlanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi di wilayah perbatasan bukan semata hasil pembangunan fisik, melainkan hasil interaksi antara kapasitas sosial-ekonomi masyarakat dan dukungan struktural pembangunan. Pemberdayaan ekonomi terbukti memainkan peran penting sebagai mekanisme transformasional yang menjembatani kemampuan individu dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal secara produktif. Dalam konteks wilayah perbatasan Kalimantan Utara, hasil ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi yang hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur tanpa penguatan kapasitas masyarakat cenderung menghasilkan dampak kesejahteraan yang kurang optimal dan tidak berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas diskursus pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dengan menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai mekanisme sentral dalam hubungan antara literasi ekonomi berkelanjutan, infrastruktur ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat perspektif bahwa pembangunan ekonomi modern tidak lagi dapat dijelaskan melalui pendekatan struktural semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi kapabilitas masyarakat dalam merespons perubahan ekonomi. Dalam perspektif SOR Theory (Stimulus–Organism–Response), literasi ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur ekonomi bertindak sebagai stimulus eksternal yang membentuk kapasitas internal masyarakat melalui proses pemberdayaan ekonomi sebagai organisme, yang pada akhirnya menghasilkan respons berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menawarkan pengembangan konseptual baru dengan menunjukkan bahwa stimulus pembangunan tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola peluang ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, studi ini menghadirkan konteks empiris wilayah perbatasan yang masih relatif jarang dibahas dalam literatur internasional, sehingga memperkaya pemahaman teoritis mengenai pembangunan ekonomi inklusif pada kawasan perifer dan tertinggal.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pengelola ekosistem ekonomi digital di Kalimantan Utara. Pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, pasar, dan akses transportasi, tetapi juga pada penguatan literasi ekonomi masyarakat melalui program edukasi kewirausahaan berkelanjutan, pelatihan pengelolaan keuangan, dan peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks UMKM dan e-commerce, pelaku usaha lokal perlu didorong untuk mengintegrasikan platform digital dalam aktivitas pemasaran dan distribusi produk agar mampu mengurangi keterbatasan geografis wilayah perbatasan. Program pemberdayaan ekonomi

sebaiknya dirancang berbasis komunitas lokal dengan pendekatan partisipatif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, pemerintah dan lembaga pembangunan perlu membangun ekosistem kolaboratif antara sektor publik, UMKM, koperasi, dan platform digital guna memperkuat akses pasar, distribusi produk lokal, serta ketahanan ekonomi masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan teoritis yang signifikan, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil penelitian. Pertama, penelitian ini dilakukan pada konteks wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan industri, sehingga generalisasi hasil penelitian ke konteks lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, model penelitian masih berfokus pada hubungan antara literasi ekonomi berkelanjutan, infrastruktur ekonomi, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat tanpa memasukkan faktor lain seperti kualitas institusi, dukungan kebijakan pemerintah, akses teknologi digital, maupun modal sosial masyarakat yang kemungkinan juga memengaruhi kesejahteraan ekonomi. Ketiga, penggunaan pendekatan cross-sectional menyebabkan penelitian ini belum mampu menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, khususnya terkait dampak berkelanjutan dari pemberdayaan ekonomi di wilayah perbatasan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian mendatang perlu mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel kelembagaan, transformasi digital, modal sosial, dan ketahanan ekonomi lokal untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana pemberdayaan ekonomi membentuk perubahan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Selain itu, studi komparatif antarwilayah perbatasan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya dapat memberikan perspektif baru mengenai efektivitas pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan dalam konteks geografis dan sosial yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi integrasi ekonomi digital dan green economy sebagai pendekatan baru dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan di era transformasi ekonomi berkelanjutan.

Daftar Referensi

- Adzmi, H., Maemunah, M., & Isnaini, I. (2024). The Impact and Role of Politics on Infrastructure Development and Socio-Economic Empowerment of North Lombok Communities. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(2), 271–284. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i2.75831>
- AllahRakha, N. (2024). Global perspectives on cybercrime legislation. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(10), 6007. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.6007>
- Arhim, A., Alzubi, A., Iyiola, K., & Banje, F. U. (2024). Unpacking the Relationship Between Empowerment Leadership and Electricity Worker's Unsafe Behavior: A Multi-Moderated Mediation Approach. *Sustainability*, 16(23), 10732. <https://doi.org/10.3390/su162310732>
- Arifin, B., Horisonta, S., Juanda, J., Rahman, A. B., Julihandono Sj, C., Atmodjo, S. Y. P., & Maulida, A. (2024). Infrastruktur Konektivitas, Peran Pemerintah, dan Perkembangan Sosial Ekonomi Regional: Bukti dari Kalimantan. *Journal of*

- Infrastructure Policy and Management, 7(1), 13–26. <https://doi.org/10.35166/jipm.v7i1.55>
- Ayu Purnamawati, I. G., Yuniarta, G. A., & Jie, F. (2023). Strengthening the role of corporate social responsibility in the dimensions of sustainable village economic development. *Heliyon*, 9(4), e15115. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15115>
- Bachelet, M. (2016). The economic empowerment of women for more productive and inclusive societies. *OECD Observer*. <https://doi.org/10.1787/c1958fec-en>
- Bahr, G., Hammer, B., & Luse, A. (2024). ICT4D and the capability approach: understanding how freedom of expression on ICTs affect human development at the country-level. *Information Technology for Development*, 31(1), 33–56. <https://doi.org/10.1080/02681102.2024.2337048>
- Balogun, M. A., Tella, S. A., Adelowokan, O. A., Ogede, J. S., & Adegboyega, S. B. (2024). Achieving sustainable development in ECOWAS countries: the impact of trade openness, poverty and human capital. *Future Business Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s43093-024-00367-9>
- Bangun, B. H., Kinanti, F. M., & Darajati, M. R. (2024). Economic Security in Border Areas: The Fulfillment of Community Welfare. *Lampung Journal of International Law*, 6(2), 69–82. <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3355>
- Barreno-Alcalde, S., Diez-Martin, F., & Escamilla-Solano, S. (2024). The Multidisciplinary Nature of the Capability Approach: Emerging Trends and Future Research Directions Through a Bibliometric Analysis. *Sage Open*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/21582440241284951>
- Bartolomei, L., Blundo-Canto, G., & De Muro, P. (2024). How is the Capability Approach Applied to Assess Well-being Impacts? A Systematic Review. *Journal of Human Development and Capabilities*, 25(3), 367–399. <https://doi.org/10.1080/19452829.2024.2369502>
- Cheung, G. W., Cooper-Thomas, H. D., Lau, R. S., & Wang, L. C. (2023). Reporting reliability, convergent and discriminant validity with structural equation modeling: A review and best-practice recommendations. *Asia Pacific Journal of Management*, 41(2), 745–783. <https://doi.org/10.1007/s10490-023-09871-y>
- Chu, T. Van, & Duong, V. H. (2024). From the border of ‘barrier’ to the border of ‘connectivity’: The current development and connectivity of Vietnam-China cross-border infrastructure. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(12), 8119. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.8119>
- Dosinta, N. F., Djafar, F., & Yantiana, N. (2024). The Role of Public Expenditures on Community Welfare. *Jurnal Economia*, 20(2), 260–272. <https://doi.org/10.21831/economia.v20i2.47545>
- Du, X., & Jiao, F. (2023). How the rural infrastructure construction drives rural economic development through rural living environment governance—case study of 285 cities in China. *Frontiers in Environmental Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1280744>
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Effendi, S. A., Sukoharsono, E. G., Purwanti, L., & Rosidi. (2023). Building Partnership or Competition: Village Business Sustainability in Indonesia. *Sustainability*, 15(18), 13703. <https://doi.org/10.3390/su151813703>

- Ekayani, N. N. S., Kartana, I. W., Putra, I. M. W., Diviariesty, K., Darma, D. C., & Setini, M. (2024). The Mediating Effect of Access to Capital in the Impact of Financial Literacy and Financial Inclusion on SME Sustainability. *Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы* | ISSN: 2073-0438, 18(4), 136–151. <https://doi.org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.18.4.2024.136-151>
- Faisal Anwar, A., Wulan Sari, D., Islamiya, H. A. T., Raja Ahmad, R. A., & Salimah Alias, N. (2024). Understanding the impact of mining activities and human capital improvement on achieving sustainable development goals; evidence from East Luwu, Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2386401>
- Hair Jr., J. F., M. Hult, G. T., M. Ringle, C., Sarstedt, M., Castillo Apraiz, J., Cepeda Carrión, G. A., & Roldán, J. L. (2019). *Manual de Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (Segunda Edición)*. OmniaScience. <https://doi.org/10.3926/oss.37>
- Haryono, B. S., Anggriawan, T., Drasospolino, Sentanu, I. G. E. P. S., & Sahputri, R. A. M. (2024). Exploring the Paradox of Local Community Empowerment in Mediating the Role of Village Fund Policy to Increase the Rural Society's Welfare: An Analysis through the Eye of Village Public Service's Users. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 22(2), 220–242. [https://doi.org/10.52152/22.2.220-242\(2024\)](https://doi.org/10.52152/22.2.220-242(2024))
- Hasan, M., Jannah, M., Supatminingsih, T., Ahmad, M. I. S., Sangkala, M., Najib, M., & Elpisah. (2024). Understanding the role of financial literacy, entrepreneurial literacy, and digital economic literacy on entrepreneurial creativity and MSMEs success: a knowledge-based view perspective. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2433708>
- Lang, N. D., Tran, H. M., Nguyen, G. T., & Vo, D. H. (2024). An Untapped Instrument in the Fight Against Poverty: The Impacts of Financial Literacy on Poverty Worldwide. *Social Indicators Research*, 174(2), 657–695. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03404-w>
- Lee, E., & Eversole, R. (2019). Rethinking the regions: Indigenous peoples and regional development. *Regional Studies*, 53(11), 1509–1519. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1587159>
- Li, W., & Lay, Y. F. (2024). Examining the reliability and validity of measuring scales related to informatization and instructional leadership using the PLS-SEM approach. *Humanities and Social Sciences Letters*, 12(3), 461–480. <https://doi.org/10.18488/73.v12i3.3789>
- Luukkanen, J., Vehmas, J., Kaivo-oja, J., & O'Mahony, T. (2024). Towards a General Theory of Sustainable Development: Using a Sustainability Window Approach to Explore All Possible Scenario Paths of Economic Growth and Degrowth. *Sustainability*, 16(13), 5326. <https://doi.org/10.3390/su16135326>
- Mensah, J. K. (2024). Inclusive and resilient local economies: Building capacity for local economic development in Ghana. *Community Development*, 55(5), 668–688. <https://doi.org/10.1080/15575330.2024.2366202>
- Mulyono, D., Hufad, A., & Wahyudin, U. (2024). Literacy Festival Program as a Means of Ecology Education for Society. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 73–84. <https://doi.org/10.21831/jppm.v11i1.61710>

- Nurjannah. (2025). Inklusi dan Literasi Keuangan: Sebuah Kajian Tentang Kinerja Wirausaha UMKM di kota Makassar. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 8(1), 40–50. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v8i1.666>
- Ohanian, R. (1990). Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers' Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness. *Journal of Advertising*, 19(3), 39–52. <https://doi.org/10.1080/00913367.1990.10673191>
- Okabe, M. (2025). Economic development of land-border regions under ASEAN economic integration. *Journal of Asian Economics*, 96, 101864. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2024.101864>
- Padmapriya, Ms., & Chud, Dr. S. C. (2024). A Structured Casualness Of Informal Sector Workers In Kanchipuram District, Tamil Nadu. *Educational Administration: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.2914>
- Pakasi, U., Faridz, M., Majid, H., & Susilawati, S. (2024). Border governance through local community empowerment: insights from Indonesia-Papua New Guinea borderline. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 693–711. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15399>
- Pontoh, R. S., Yang, V. V., Laura, G. Y., Riantika, R. A., Arisanti, R., Winarni, S., & Gumelar, F. (2024). Assessing Sustainable Development in Community Welfare and Economic Resilience to Extreme Weather in Indonesia. *Sustainability*, 16(15), 6693. <https://doi.org/10.3390/su16156693>
- Prayitno, P. H., Sahid, S., & Hussin, M. (2022). Social Capital and Household Economic Welfare: Do Entrepreneurship, Financial and Digital Literacy Matter? *Sustainability*, 14(24), 16970. <https://doi.org/10.3390/su142416970>
- Rahim, D. A., Kasikoen, K. M., Supartoyo, Y. H., & Setiawan, S. (2024). Infrastructure Development in Border Areas; Who Benefits? *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(07), 2771–2777. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190734>
- Rahim, D. A., Priyarsono, D. S., Syaikat, Y., & Rustiadi, E. (2023). Sustainable Development of Indonesia's Land Border Areas; Overview from an Economic Perspective. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 172–189. <https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.20387>
- Rochmayanto, Y., Nurrochmat, D. R., Nugroho, B., Darusman, D., Satria, A., Casse, T., Erbaugh, J. T., & Wicaksono, D. (2023). Devolution of forest management to local communities and its impacts on livelihoods and deforestation in Berau, Indonesia. *Heliyon*, 9(5), e16115. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16115>
- Rosário, A. T., & Figueiredo, J. (2024). Sustainable entrepreneurship and corporate social responsibility: Analysing the state of research. *Sustainable Environment*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/27658511.2024.2324572>
- Sarjiyanto, S., Mulki, Y. A., & Istiqomah, N. (2024). The impact of typology capital on community empowerment programs: evidence from rural development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 17–35. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.20083>
- Sarstedt, M., Richter, N. F., Hauff, S., & Ringle, C. M. (2024a). Combined importance–performance map analysis (cIPMA) in partial least squares structural equation modeling (PLS–SEM): a SmartPLS 4 tutorial. *Journal of Marketing Analytics*, 12(4), 746–760. <https://doi.org/10.1057/s41270-024-00325-y>

- Sarstedt, M., Richter, N. F., Hauff, S., & Ringle, C. M. (2024b). Combined importance–performance map analysis (cIPMA) in partial least squares structural equation modeling (PLS–SEM): a SmartPLS 4 tutorial. *Journal of Marketing Analytics*, 12(4), 746–760. <https://doi.org/10.1057/s41270-024-00325-y>
- Shen, Y., Wang, Y., He, J., Chen, Y., Shi, X., & Li, Y. (2025). Evaluating regional disparities in socio-economic vulnerability to coal phase-out across Chinese cities. *Cell Reports Sustainability*, 2(10), 100438. <https://doi.org/10.1016/j.crsus.2025.100438>
- Straub, S., Serebrisky, T., Bagnoli, L. S., & Rojas, C. (2025). Infrastructure and Poverty Reduction: Innovative Policies for Effective Access. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0013445>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). PLS-SEM for Multivariate Analysis: A Practical Guide to Educational Research using SmartPLS. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 4(3), 353–365. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline2861>
- Tobing-David, V. E., Adi, I. R., & Nuryana, M. (2024). Conditions of Sustainable Welfare: A Cross-Case Empirical Analysis of 22 Locality-Based Welfare Systems in Decentralised Indonesia. *Sustainability*, 16(4), 1629. <https://doi.org/10.3390/su16041629>
- Tong, J., Li, Y., & Yang, Y. (2024). System Construction, Tourism Empowerment, and Community Participation: The Sustainable Way of Rural Tourism Development. *Sustainability*, 16(1), 422. <https://doi.org/10.3390/su16010422>
- Umam, K. (2021). Intervensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Publikasi Ilmiah sebagai Upaya Pengembangan Dalam Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus pada WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.14421/welfare.2021.101-06>
- Wahyudin, U., & Suryono, J. (2024). Economic empowerment of remote traditional communities through access to women’s services, youth, business and work. *AMCA Journal of Community Development*, 4(2), 56–67. <https://doi.org/10.51773/ajcd.v4i2.396>
- Wang, Y., & Ye, D. (2024). Enhancing Rural Revitalization in China through Digital Economic Transformation and Green Entrepreneurship. *Sustainability*, 16(10), 4147. <https://doi.org/10.3390/su16104147>
- Zhang, Y. (2024). Economic Development Zones Empowering Regional Economies for High Quality Development Pathway Studies — Take L Economic Development Zone in City D as an Example. *Journal of World Economy*, 3(3), 84–89. <https://doi.org/10.56397/jwe.2024.09.09>
- Zhou, D., Zha, F., Qiu, W., & Zhang, X. (2024). Does digital literacy reduce the risk of returning to poverty? Evidence from China. *Telecommunications Policy*, 48(6), 102768. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102768>